

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam judul penulisan skripsi, penulis menggunakan kata ekspor sebagai pokok bahasan. Berikut definisi dari ekspor yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengiriman barang dagangan ke luar negeri.¹ Jadi, ekspor juga merupakan proses hubungan internasional atau lebih tepatnya perdagangan internasional. Karena dilakukan oleh dua atau lebih negara dengan melakukan aktivitas perdagangan luar negeri.

Oleh karena proses ekspor dilakukan dengan melibatkan negara lain dalam membangun sebuah hubungan ekonomi antar negara. Fenomena tersebut kiranya sesuai dengan studi hubungan internasional dan oleh sebab itu, mengapa penulis memilih kata industrialisasi dan ekspor sebagai pokok bahasan dalam penulisan berikut. Karena, pada umumnya hasil dari sebuah proses industri selain menjadi konsumsi domestik juga berorientasi ekspor.

Peranan ekspor menurut A. Smith, D. Ricardo, dan J.S. Mill² :

- a. Perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhirnya akan dapat memperlaju perkembangan ekonomi suatu negara.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal 290.

² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Bima Grafika, 1982. hal.225-228.

- b. Memungkinkan suatu negara memperluas pasar dari hasil-hasil produksinya dan memungkinkan negara tersebut menggunakan teknologi yang dikembangkan di luar negeri, yang lebih baik keadaannya daripada yang terdapat di dalam negeri.
- c. Perdagangan luar negeri akan mempertinggi tingkat spesialisasi, mempertinggi efisiensi penggunaan mesin yang ada, dan akan mendorong usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi proses produksi dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan (inovasi).

Peran dari ekspor memang memberikan kontribusi lebih bagi suatu negara dan memang sangat menentukan perkembangan perekonomian suatu negara. Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor mendorong industri suatu negara memperhatikan mutu dan harga agar mampu bersaing pada pasar internasional.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi persaingan global yang semakin pesat perkembangannya saat ini, mampu mendorong negara-negara untuk saling berlomba untuk menguasai pasar dunia. Peningkatan mutu produk lokal agar dapat mampu bersaing dengan produk luar, dalam pasar internasional. Sehingga, hanya sedikit negara yang mampu untuk dapat bersaing, salah satunya adalah Korea Selatan, yang secara luar biasa mampu membuka mata dunia untuk mengakui produk-produknya terutama produk manufakturnya. Industri di Korea Selatan memang benar-benar berkembang pesat, berbagai produk Korea dalam dua dasawarsa terakhir, khususnya elektronik dan

kendaraan bermotor semakin mengglobal. Keberhasilan ini membuat Korea mendapat julukan 'the miracle on the Hangang river', keajaiban di Hangang, sungai terbesar di 'Negeri Ginseng' ini.³

Sebagai salah satu dari empat Macan Asia Timur, Korea Selatan telah berhasil mencapai rekor pertumbuhan ekonomi dengan sangat memukau. Membuat Korea Selatan menempati peringkat ekonomi terbesar ke-12 di seluruh dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, PDB per kapita kira-kira sama dengan negara miskin lainnya di Afrika dan Asia. Kemudian Perang Korea membuat kondisi semakin parah. Sekarang PDB per kapita kira-kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama dengan ekonomi-ekonomi menengah di Uni Eropa. Bahkan pada 2004, Korea Selatan bergabung dengan "klub trilyun dolar".

Tentu saja perjalanan Korea Selatan menuju perekonomian yang maju tidaklah mudah, perjalanan dimulai sejak tahun 1962 hingga dalam waktu yang kurang dari empat dekade, Korea Selatan telah mencapai sesuatu yang dikenal dengan "keajaiban ekonomi dari Sungai Han" sebuah sungai yang membelah kota Seoul. Sebuah strategi dalam pengembangan ekonomi yang berorientasi ke luar, yang menggunakan ekspor sebagai mesin pertumbuhan, memberi sumbangan besar bagi transformasi ekonomi Korea Selatan.

Dari tahun 1962 sampai tahun 1972 pendapatan kotor Korsel meningkat dari 2,3 milyar dolar Amerika menjadi 474 milyar dolar Amerika, sedangkan pendapatan

³ *Republika*, Kamis, 8 Desember 2005, Belajar dari Korea, rubrik Resonansi Kolom Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA.

perkapita meningkat tajam dari 87 dolar menjadi 10.307 dolar Amerika.⁴ Pada akhir tahun 1980-an atau awal 1990, Korea menerapkan sistem hubungan pemerintah atau swasta yang tertutup, antara lain dengan menerapkan kredit langsung, pembatasan impor, mendanai perusahaan-perusahaan kecil, usaha keras dari para pekerja. Pemerintah mempromosikan bahan-bahan mentah dan teknologi sesuai kebutuhan konsumen, dan menyarankan penyimpanan dan investasi.

Kesuksesan ini dicapai pada akhir 1980-an. Pemerintah mempromosikan impor bahan mentah dan teknologi demi barang konsumsi dan mendorong tabungan dan investasi dari konsumsi. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997-1999 memperlihatkan kelemahan model pembangunan di Korea Selatan, seperti tingginya rasio utang, peminjaman besar-besaran ke luar negeri dan ketidakdisiplinan dalam sektor finansial yang tidak terencana.⁵

Pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan drastis, dari 8,6% tahun 1996 menjadi minus 1% tahun 1998. Produk Nasional Bruto turun dari 480 miliar dolar AS tahun 1996, hanya menjadi 318 miliar dolar AS tahun 1998. GNP per kapitanya turun dari 11,380 ribu dolar AS per tahun, menjadi 6,823 dolar AS pada tahun 1998.⁶ Pertumbuhan jatuh sekitar 6,6% pada 1998, kemudian pulih dengan cepat menuju angka 10,8% pada 1999 dan 9,2% pada tahun 2000. Hal ini merupakan keberhasilan pemerintahan Kim Dae-Jung.

⁴ "Korea Selayang Pandang", Pelayanan Informasi Korea, Seoul, 1999, hal. 61.

⁵ www.cia.com. Diakses tanggal 14 Oktober 2006 jam 19:20

⁶ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0204/23/opi01.html>. Diakses tanggal 4 Desember 2007 jam 17:05

Sedang dinamika dari perkembangan ekspor dan impor Korea dimulai sejak tahun 1960-an, karena sebelum itu Korea Selatan merupakan negara yang baru menyelesaikan perang dengan saudaranya di Utara. Pada tahun 1950 ini menyiratkan kondisi Korea Selatan yang hancur setelah Perang Sipil berakhir pada tahun 1953. Korea Selatan dikenal dunia sebagai negara yang sangat miskin. Dengan Produk Nasional Bruto atau PNB sebesar 80 dolar per kepala, negeri itu diperkirakan akan menjadi penerima bantuan donor jangka panjang. Kelaparan dan kemiskinan sudah biasa dialami warganya pada saat itu. Impor pada saat itu berkisar pada bahan makanan, terhitung 70 persen pangan berasal dari Amerika Serikat dan pemerintah tidak punya anggaran apa pun saat itu. Namun denyut dari perkembangan ekspor-impor mulai tampak tidak lama setelahnya. Tercatat mulai 1975 dinamikanya mulai tampak, dimulai dengan 5,081 juta dolar AS pada ekspor dan 7,274 juta dolar AS pada impor dengan total transaksi 12,355 juta dolar AS. Pertumbuhan terus menerus naik hingga puncaknya pada tahun 1995-1996, dengan total transaksi mencapai 280,054 juta dolar AS, 129,715 juta dolar AS pada ekspor dan 150,339 juta dolar AS. Pada saat itu volume impor Korea melebihi Cina dan seimbang dengan gabungan impor Malaysia, Indonesia, dan Filipina, dan termasuk sebagai salah satu pasar impor terbesar di dunia. Kenaikan terus dirasakan Korea hingga sebelum gejolak krisis dirasakan, pada 1997 ekspor naik mencapai 136,164 juta dolar AS dan impor mengalami sedikit penurunan 144,615 juta dolar AS dengan total transaksi 280,780 juta dolar AS. Penurunan drastis terasa pada tahun 1998, dengan total transaksi yang

hanya 226,515 juta dolar AS. Nilai impor turun hingga 93,282 juta dolar AS, namun Korea berhasil menekan laju penurunan di sektor ekspor, yang hanya turun sedikit di angka 132,313 juta dolar AS.⁷ Namun perjalanan ekonomi perlahan-lahan menunjukkan perbaikan di sektor ini.

Pertumbuhan ekspor menunjukkan bahwa Perekonomian Korea Selatan semakin membaik setelah mengalami sedikit gangguan. Sebelumnya, perekonomian melamban karena ekspor menurun dan permintaan dalam negeri merosot. Ekspor sempat gagal dalam mendorong pemulihan ekonomi karena konsumsi menurun dan investasi terhambat. Namun, kini penjualan produksi Korea, seperti kapal, mobil, dan baja ke luar negeri makin meningkat. Terutama ekspor ke negara Uni Eropa, Brasil, India, dan China. Khusus elektronik, Korea tercatat sebagai negara terbesar keempat dalam ekspor elektronik digital setelah Jepang, Amerika Serikat, dan China. Bahkan, Pemerintah Korea berharap agar ekspor elektronik digital mencapai 300 miliar dollar AS sehingga mampu merebut pangsa pasar internasional sebanyak 14 persen hingga tahun 2015.⁸

Pada 2005, di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan-tinggi, semikonduktor memori, monitor layar-datar dan telepon genggam, Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif dan keenam dalam

⁷ "Korea Selayang Pandang" *Op.cit.* hal.63.

⁸ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/17/ekonomi/2517626.htm>. diakses pada tanggal 15 Desember 2006 jam 23:46

baja. Negara ini juga dalam peringkat ke-12 dalam PDB nominal, tingkat pengangguran rendah, dan pendistribusian pendapatan yang relatif merata.

C. Pokok Permasalahan

Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Korea Selatan Untuk Meningkatkan Kembali Nilai Ekspor Pasca Terjadinya Krisis 1997?

D. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk membuktikan dan mengetahui seberapa sukses Korea Selatan dalam meningkatkan kembali nilai ekspor setelah terjadinya krisis moneter 1997. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi jendela bagi kita semua, untuk melihat sebuah negara yang dengan usia yang tidak terlampau jauh dengan negara kita. Namun, dapat dengan cemerlang mampu mensejajarkan dirinya dengan negara yang jauh lebih maju sebelumnya.

Selain itu penulisan ini juga dimaksudkan guna menerapkan teori dan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan. Serta sebagai pelengkap dari sebuah rangkaian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban penulis dalam studi yang dijalaninya, guna memperoleh gelar S1. Juga, sebagai sebuah bentuk karya dari mahasiswa dalam sebuah proses mengamati sebuah fenomena internasional untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

E. Jangkauan Penulisan

Untuk mencegah terlalu luasnya wilayah kajian serta pelebaran masalah maka, pemberian batasan dengan ruang lingkup penelitian dibatasi pada wilayah Korea Selatan dengan fokus analisa adalah gemilangnya pengembangan dalam bidang industri, dan juga cepatnya pemulihan kondisi perekonomian negara dari krisis yang dialaminya pada tahun 1997. Peningkatan nilai ekspor juga menjadi senjata negara ini bangkit dari krisis. Untuk itu, geliat dari perkembangan proses industri dan peningkatan nilai ekspor pasca krisis ekonomi 1997 yang di alami Korea Selatan menjadi batasan dan topik utama yang akan dibahas dalam kesempatan penulisan kali ini.

F. Kerangka Pemikiran / Teori

Untuk dapat memudahkan pemahaman dari semua fenomena-fenomena serta data-data yang telah penulis kemukakan diatas, dan juga dirasa sangat berguna untuk menuntun proses pengambilan hipotesa secara sistematis. Maka, digunakanlah teori yang juga dapat berupa sebuah pernyataan yang menggabungkan konsep-konsep secara logis.⁹

⁹ Jack C. Plano, *The International Dictionary*, Santa Barbara, California Press, 1992, hal. 25

• Teori Peran

Menurut Jack C. Plano,

“Teori peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.”¹⁰

Maka maksud dari teori peran, bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki pola perilaku tertentu pula. Sehingga aktor akan sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul.

Harapan tersebut dapat berasal dari dua sumber, yaitu dari luar dan dari dalam aktor itu sendiri. Harapan juga dapat muncul dari cara sang aktor menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukannya juga termasuk apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dikerjakan. Harapan dari sang aktor ini biasanya akan menjadi gagasan sang aktor. Sebagian besar gagasan ini biasanya mencerminkan sikap, ideologi dan kepribadian yang dikembangkan sebelum memegang peranan yang dimainkan.

Suasana krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan pada bulan November 1997, tidak berbeda jauh dengan fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia dan kebanyakan negara di Asia pada saat itu. Banyak perusahaan-perusahaan besar terpaksa gulung tikar, likuidasi, penggabungan, hingga penjualan Bank-Bank kepada

¹⁰ Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 44.

lembaga-lembaga asing juga terpaksa dilakukan. Tercatat 5 Bank, 16 Bank Dagang, 4 perusahaan asuransi dan 6 lembaga keamanan ditutup. Sementara Korea First Bank dan Seoul Bank dijual kepada lembaga-lembaga di luar negeri. Bank Hanvit, Kookmin, dan Hana digabung menjadi satu. Beberapa Bank lainnya harus menarik modal luar negerinya guna memastikan bahwa mereka dapat bertahan. Suntikan dana dari pemerintah tak terhindarkan untuk menormalisasi sistem keuangan Korea.¹¹

Pada saat itulah mulai tampak, kelemahan dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh Korea pada masa yang lalu. Sistem ekonomi yang sarat akan adanya korupsi dan kekurangan pengawasan struktural dalam pembendungan kolusi antara pemerintah-pengusaha dan adanya campur tangan yang terlalu banyak dari pemerintah di penghujung tahun 1997. Sesungguhnya, intervensi pemerintah pada saat krisis juga sangat diperlukan. Namun, otonomi manajemen institusi keuangan tentunya harus lebih dihormati.

Hingga 18 Desember 1997, dengan terpilihnya Kim Dae-Jung sebagai presiden Korea Selatan periode pemerintahan 1997-2004. Menggantikan Kim Young-Sam, mengakhiri krisis kepemimpinan pada masyarakat. Sesaat setelah terpilih pemerintahan Kim Dae-Jung langsung juga menjalankan reformasi struktur ekonomi dan politik secara tuntas. Korea Selatan secara sungguh-sungguh melakukan restrukturisasi sistem yang dipakai chaebol, promosi fleksibilitas di pasar tenaga

¹¹ KOREA FOCUS, *Rationale and Direction of Korea's Economic Reform Policy*, July-August 1999. p.90

kerja, liberalisasi pasar domestik dan menarik daya tarik investor melalui penciptaan stabilitas politik yang sehat.

Di bidang perbankan, Korea Selatan menjalankan paket restrukturisasi keuangan, memperkuat fungsi legislasi Komisi Pengawas Keuangan (FSC), menciptakan mekanisme pengatur (UU baru) yang secara ketat menetapkan praktik-praktik bank secara universal, dan sebagainya. FSC memainkan peran yang penting dalam mempromosikan alokasi modal secara efisien dan mengurangi kelemahan pasar Korea Selatan, yang sangat tergantung pada berubahnya pasar-pasar keuangan internasional. Dalam reformasi sektor keuangan ini, pemerintah tidak tanggung-tanggung menutup beberapa lembaga keuangan yang tidak bisa berfungsi, sementara perbankan lainnya yang masih tetap berjalan, mentaati petunjuk FSC untuk memperbaiki kinerja mereka. Dalam masa dua tahun setelah ditimpa krisis (sejak akhir 2000), Korea Selatan kembali mengalami pemulihan dan sekarang perekonomiannya dalam kondisi yang stabil. Pertumbuhan ekonominya telah kembali pada kondisi normal.

Selain itu pemerintahan Kim Dae-Jung, juga lebih mengatur dan mengendalikan sepaik terjang *Chaebol*, atau para konglomerat yang pada sebelum masa krisis memiliki kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, hingga menjalin hubungan khusus dengan pemerintah mulai diatur dengan melakukan reformasi perombakan *chaebol*. Selain itu pemerintah juga mulai memperhatikan

keberadaan kelas menengah yang di Korea didominasi oleh kaum buruh, karena pada saat krisis kelas ini juga mendapat imbas yang besar pula.

• Teori “Developmental State”

Banyak yang mengkaitkan teori ini dengan kemajuan negara-negara di Asia pada umumnya dan kawasan Asia Timur pada khususnya, seperti kemajuan Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan. Wajar, karena teori ini intinya adalah dominasi dari kekuasaan negara atau pemerintah dalam pembangunan ekonomi, terutama sekali dalam hal industrialisasi, dapat diimplementasikan pada sistem politik yang otoriter maupun demokratik. Dengan demikian *developmental state* bukanlah merupakan konsep ataupun model pembangunan yang monolit. Ia bisa berlangsung pada sistem politik yang berbeda, biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang.¹²

Hal tersebut, tentunya juga tidak lepas dari sebuah usaha revolusi dari kemajuan ekonomi dan perubahan status atas negara-negara tersebut, yang tadinya disebut sebagai negara kurang berkembang (NKB) menuju negara berkembang atau bahkan mampu mengangkat derajatnya menjadi negara industri baru (NIB). Sehingga dapat dikatakan teori ini mampu meredam teori ketergantungan, yang menyatakan bahwa, negara berkembang tidak akan mampu menjadi negara maju karena jeratan ekonomi kapitalisme yang dikembangkan oleh negara industri maju (NIM). Seperti apa yang dikatakan Arief Budiman dalam sebuah tulisan, sbb:

¹² Tulus Warsito, *Demokratisasi Pasca Krisis 1997 di Korea Selatan (Studi Kasus Hubungan Industrial di Korea Selatan)*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005.

“Ketergantungan yang berlebihan terhadap negara-negara maju adalah faktor utama mengapa negara-negara pinggiran sulit berkembang. Pola hubungan yang tidak setara menciptakan kesenjangan yang terus melebar antara negara-negara kapitalis dan negara-negara miskin.”¹³

Fenomena negara kurang berkembang (NKB) sendiri muncul setelah tahun 1960-an karena umumnya status NKB disandang negara-negara bekas jajahan pemerintahan kolonial atau dengan kata lain negara industri maju (NIM). Yang sebelumnya tidak pernah dianggap oleh para ilmuwan, baru setelah jumlah negara baru merdeka cukup banyak untuk menguasai mayoritas suara dalam Majelis Umum PBB. Maka, mulailah negara-negara baru tersebut mulai buka suara, dan secara kolektif mampu mulai menyerang prinsip “*trade as the engine of growth*”.¹⁴

Berikut, dua jenis dari *developmental state* yang pernah digunakan oleh Korea dalam proses pembangunan dan perkembangan demokrasi yang terjadi di Korea Selatan.

1. Yang pertama adalah pada era pemerintahan Kim You-Sam, yakni *embedded democracy* versi dari Peter Evans. Dari konsep *developmental state* jenis ini, Evans mengusulkan bahwa otonomi harus bersifat mengakar (*embedded*) bagi para kelompok elit dan didukung hubungan kerjasama yang baik antar para tokoh industrial (konglomerat dan pemerintah). Otoritarianisme yang pada tahap awal pembentukan *developmental state* digunakan mulai dihilangkan.

¹³ www.freedom-institute.org/id diakses tanggal 10 November 2006 jam 15:30

¹⁴ Mohtar Mas' oed, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994. hal: 7.

2. Sedangkan, yang jenis kedua ialah konsep *developmental state* yang merupakan versi dari Gordon White dengan "win-win" democracy-nya pada era presiden Kim Dae-Jung. Yakni, dengan merekonstruksi *developmental state* menjadi manajemen pasar oleh negara yang harus sesuai dengan asas demokrasi setinggi-tingginya. Jadi maksudnya ialah pemerintah dituntut untuk lebih aktif dalam mengatur pasar, tetapi dengan tidak meninggalkan asas demokrasi yang telah dibangun sebelumnya.¹⁵

G. Hipotesis

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah, rumusan pokok permasalahan dan kerangka dasar teori, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Pemerintah Korea Selatan berusaha bangkit dari keterpurukannya pada saat menghadapi krisis ekonomi 1997, termasuk pada usahanya dalam meningkatkan kembali nilai ekspor. Dengan sigap, pemerintahan Kim Dae-Jung melakukan langkah strategis sbb:

1. **Pertama, dengan menghentikan izin operasi perusahaan-perusahaan yang kolaps. Para chaebol dipaksa melikuidasi anak-anak perusahaan yang tidak produktif dan melakukan perbaikan struktural permodalan.**
2. **Sedangkan yang kedua melalui, liberalisasi undang-undang investasi asing. Pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang sehat bagi**

¹⁵ Tulus Warsito, *Op.cit.*.

investasi asing. Juga, pembuatan kebijakan yang mendukung dan melindungi bagi para investor asing.

H. Metodologi Penulisan

Dalam penulisan ini dilakukan dengan metode analisis data sekunder, yakni suatu analisa pustaka dari berbagai sumber, seperti dari buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan bermacam artikel dari berbagai sumber di internet.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat dibahas secara teratur serta saling terkait satu dengan lainnya menuju ke pokok bahasan, maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: Mengemukakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, dan kerangka penulisan, yang penulis rangkai sedemikian rupa sehingga secara garis besar bab ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan.

BAB II: Membahas mengenai peran pemerintah dalam menangani krisis ekonomi 1997, baik pada saat akhir kekuasaan presiden Kim Young-Sam. Maupun, saat presiden Kim Dae-Jung yang dengan gemilang berhasil mengeluarkan Korea Selatan dari krisis ekonomi.

BAB III: Menguraikan sikap tegas pemerintah yang mulai mendengarkan suara dari kelas menengah, melakukan kesepakatan dengan IMF dengan menjalankan segala konsekuensi dari program yang ditawarkan IMF dengan cara penyelesaian krisis ala pemerintahan presiden Kim Dae-Jung serta, melakukan perbaikan pola hubungan dengan Chaebol.

BAB IV: Akan membahas tentang langkah-langkah strategis pemerintah Korea dalam meningkatkan ekspor pasca terjadinya krisis.

BAB V: Kesimpulan